



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir B. Gandang, 22 Desember 1980, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK xxxx, golongan darah A, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dengan alamat di Kota Batam; sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir D. Jantung, 18 Februari 1983, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/151/II/2005 tanggal 25 Februari 2005);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. anak Pemohon dengan Termohon, umur 11 tahun
 - b. anak Pemohon dengan Termohon, umur 7 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri dan Ibu dari 2 orang anak kandugnyanya. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sampai saat ini;
 - b. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti lebih sibuk dengan handpone daripada untuk mengerjakan kewajibannya di dalam rumah tangga;
 - c. Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain sejak tahun 2014 sampai saat ini;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2017, yang akibatnya ;
Pemohon dengan Termohon pisah rumah.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 hal.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tersebut tidak hadir, majelis hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan, agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dan bisa berbaik kembali dengan Termohon, atas nasehat dari majelis tersebut, Pemohon dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon dipersidangan, maka dengan demikian perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 hal.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, majelis hakim memberikan pandangan dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas nasehat dari majelis hakim tersebut, Pemohon dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, dan oleh karena permohonan belum dibacakan maka tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, hal ini sesuai pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara in;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan

Halaman 4 dari 5 hal.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 Hijriah oleh Drs. M. SYUKRI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BADRIANUS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Drs. M. SYUKRI

Drs. AHD. SYARWANI

Panitera Pengganti,

BADRIANUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	261.000,00

Halaman 5 dari 5 hal.Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm